



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers
Seminar Regional Baucau
06 Februari 2017

JSMP merealisasikan seminar regional mengenai peranan Parlemen Nasional dan sektor peradilan formal di Timor-Leste

Pada tanggal 03 Februari 2017, JSMP merealisasikan sebuah seminar regional di Kota Madya Baucau mengenai “Peranan Parlemen Nasional dan Para Aktor Peradilan di Sistem Hukum Formal Timor-Leste”. Para peserta dalam seminar tersebut berasal dari berbagai lapisan struktur desa seperti kepala desa, delegasi perempuan, dewan desa dan pemuka masyarakat yang terdiri dari 16 desa dari Kecamatan Vemasse, Kota-Madya Baucau, Kecamatan Lautem, Kota Madya Lautem dan Kecamatan Ossu, Kota-Madya Viqueque. Total peserta berjumlah 25 orang dengan komposisi 7 orang perempuan dan laki-laki 18 orang.

Para pembicara dalam seminar ini terdiri dari perwakilan Pengadilan Baucau dan lembaga swadaya masyarakat. Pembicara dari Pengadilan adalah Ketua Pengadilan Baucau, Yang Mulia Hakim Afonso Carmona, yang menyampaikan materi mengenai Peranan Sistem Hukum Formal, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat diwakili oleh Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio yang menyampaikan materi mengenai hasil pemantauan JSMP di Parlemen dan Pengadilan.

Seminar ini bertujuan untuk memfasilitasi hubungan langsung antara para peserta yang telah menerima pelatihan mengenai demokrasi, peranan lembaga-lembaga kedaulatan Negara, partisipasi publik dalam proses legislatif dan akses terhadap sistem peradilan formal dengan perwakilan dari lembaga-lembaga kedaulatan, secara khusus Parlemen Nasional dan Pengadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperdalam pengetahuan mereka dan juga dapat menyampaikan pandangan, kritik, keraguan mereka dan keprihatinan mereka terkait peranan dari institusi-institusi kedaulatan tersebut. Sayangnya, perwakilan dari Parlemen Nasional tidak hadir karena memiliki agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan.

Hal-hal yang diangkat dalam seminar tersebut mengenai prosedur penangkapan bagi para pelaku kriminal, penahanan terhadap para terdakwa tanpa surat perintah penangkapan, prosedur pengaduan kasus pidana dan perdata termasuk penepatan undang-undang Portugis, Indonesia dan UNTAET selama ini.

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telephone: 3323883 | 77295795 www.jsmp.tl
info@jsmp.tl
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl

Para peserta juga mengajukan masalah mengenai sengketa tanah antara mereka yang mendiami tanah orang lain dan kemudian mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka, menurut aturan hukuma siapa yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut. Mereka juga mempersoalkan perubahan atas UU Pensiunan Seumur Hidup (*Lei Pensaun Mensál Vitalísia*) yang disiapkan oleh Parlemen Nasional tidak memberikan mamfaat kepada Negara untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan implikasinya terhadap kehidupan rakyat.

Selain itu para peserta juga mengangkat masalah mengenai perubahan atas UU No. 9/2016 dari UU No. 3/2009 mengenai Otoritas Desa yang tidak memberikan manfaat bagi struktur desa dan berimplikasi ketidakpuasan dari para otoritas suku karena tidak ada gaji untuk para delegasi dan hanya dihitung melalui daftar hadir. Mengenai undang-undang yang masih tertunda di PN mereka meminta kepada PN dan Pemerintah melalui JSMP untuk mempercepat proses diskusi mengenai undang-undang tersebut, terutama undang-undang mengenai hak atas tanah.

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pembicara dari Pengadilan menerangkan bahwa sejauh ini peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku di Timor-Leste adalah undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah Timor-Leste dan juga mengadopsi undang-undang lainnya untuk diterapkan apabila belun ada undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang produk Indonesia dan yang lainnya tersebut.

Sementara mengenai masalah perubahan atas Undang-Undang Pensiunan Seumur Hidup, ini merupakan proses politik di Parlemen Nasional. JSMP juga prihatin dengan keputusan tersebut dan mendorong rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembagunan Negara dan berharap bahwa pada periode legislatif yang akan datang akan memperbaiki undang-undang tersebut sesuai dengan kondisi real Timor-Leste.

Paket Undang-Undang Tanah masih dalam proses diskusi, oleh karena itu diyakini bahwa dalam waktu dekat PN akan mengesahkannya. Sesuai dengan janji mereka yang mereka umumkan kepada publik bahwa sebelum mandate mereka berakhir mereka akan menyelesaikan undang-undang tersebut. Selain itu mereka juga akan memberikan prioritas kepada RUU Anti Korupsi yang masih tertunda di Parlemen Nasional.

JSMP sangat berterima kasih atas kehadiran para peserta dan para pembicara, terutama kehadiran Ketua Pengadilan Baucaua di seminar regional tersebut.

Para peserta merekomendasikan agar program seperti ini dilanjutkan di tempat lainnya, terutama di masyarakat yang kurang mendapatkan akses informasi hukum seperti ini.

JSMP berharap bahwa forum seperti ini dapat menyediakan referensi yang bermanfaat dan real kepada para pengambil keputusan dan terutama pihak pengadilan untuk mengintegrasikan realitas dan kebutuhan real masyarakat dalam proses penegakan hukum di Timor-Leste.

Menurut rencana, program ini akan dilaksanakan di Kota-Madya Dili pada bulan Februari dan Maret 2017. Programa ini terselenggara atas dukungan dari Pemerintah Australia melalui AusAID dari tahun 2016-2017.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direkturr Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl